BAB 2

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum atau profil dari objek penelitian. Penelitian akan diselenggarakan di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Yogyakarta. Adapun penjelasan dalam bab ini akan berisi informasi mengenai sejarah BPSDMP Kominfo Yogyakarta, Mengenai BPSDMP Kominfo Yogyakarta, *Tagline*, visi dan misi, Tujuan, Sasaran, Struktur Organisasi, Area Wilayah Tugas Pokok, Fungsi,Tata Nilai.

2.1 Sejarah BPSDMP Kominfo Yogyakarta

Awal mula berdirinya Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo), bermula dari keputusan sidang Komite Nasional Pusat (KNP) di Yogyakarta pada tahun 1949 tentang tindak lanjut dari terbentuknya Panitia Pers, dengan Implementasinya dibentuk suatu lembaga yang membantu meningkatkan kualitas pers nasional, maka di bentuklah Lembaga Pers dan Pendapat Umum (LPPU) yang merupakan nama awal sebelumnya nama lembaga sekarang ini, yang bergerak langsung dibawah naungan Departemen Penerangan Republik Indonesia pada tanggal 22 November 1952.

Pendirian Lembaga Pers dan Pendapat Umum, tidak lepas dari peran Pemerintah bersama parlemen untuk membentuk suatu Panitia Kerja (*adhoc*) yang kemudian bersama Panitia Pers bertugas menyusun tentang perundangan mengenai pers, dengan melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan

Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dalam memajukan pers nasional. LPPU sendiri tidak hanya berada di Yogyakarta, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan LPPU Jakarta sebagai Lembaga pertama yang dibentuk tanggal 1 september 1952 oleh kepemimpinan seorang pegawai Kementerian Penerangan bernama A.A Van Goudoever. Selanjutnya di tanggal 22 November 1952 barulah diresmikan pendirian LPPU Yogyakarta yang dipimpin oleh Soendoro Tirtosiswoyo yang merupakan tokoh pers dan dosen publistik Universitas Gajah Mada, lengkap dengan kantor dan pustakanya. LPPU lain yang segera menyusul berdiri yaitu di Surabaya, Bandung, Makasar, Medan, Banjarmasin, dan Manado.

Selama kurun waktu kurang lebih satu tahun, tepatnya pada bulan juli 1953 terbut suatu akta yang mengesahkan keberadaan Yayasan LPPU, yang semula berada di bawah Departemen Penerangan menjadi lembaga yang berdiri sendiri sampai dengan tahun 1979. Keberadaan LPPU yang independen dan cukup berpengaruh terhadap dunia Pers, mendorong pemerintah Orde baru pada tahun 1997 untuk memasukkan kembali lembaga itu menjadi bagian dari Departemen Penerangan dengan Kementerian Penerbitan Aparatur Negara, dengan memunculkan kebijakan untuk melakukan kontrol terhadap media massa yang langsung berada dibawah struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Pers dan Pendapat Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Penerangan No. 98E/Kep/Menpan/1979. Surat keputusan tersebut menyatakan bahwa nama lembaga LPPU berubah menjadi Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U) dengan kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pers dan pendapat umum yang meliputi wilayah DIY dan Jawa Tengah.

BP3U memiliki Tugas utama yaitu mengikuti perkembangan pers di DIY dan Jawa Tengah, serta melakukan penelitian dan pendapat umum. Dengan fungsi (1) Mengadakan penelitian mengenai perkembangan pers di wilayah DIY dan Jawa Tengah serta membina pendapat umum; (2) melaksanakan dokumentasi tentang perkembangan pers dan media massa lainnya yang berada di wilayah DIY dan Provinsi Jawa Tengah; (3) menyusun kepustakaan khusus untuk pers dan pendidikan pers untuk DIY dan Provinsi Jawa Tengah; (4) mengadakan publikasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan serta menerbitkan Almanak Pers Daerah, Petunjuk Pers Daerah, Kronik Pers Daerah meliputi DIY dan Provinsi Jawa Tengah baik secara periodik maupun isidental.

Guna menopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka struktur organisasi BP3U berdasarkan SK Menpen No. 98E/1979, terdiri dari: Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penelitian, Seksi Dokumentasi, dan Seksi Perpustakaan. Secara kelembagaan BP3U masuk kedalam struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan. Tetapi dengan dibubarkannya Deppen pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), BP3U berganti menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informai (BPPI) dan berada dibawah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), yang kemudian menjadi Lembaga informasi Nasional (LIN). Status kelembagaan BPPI diatur dalam Surat Keputusan Kepala LIN No. 38/SK/2001. Dimana pada masa tersebut merupakan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.

Dalam perkembangan selanjutnya, dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdasarkan atas peraturan presiden No. 9 tahun 2005, tentang kedudukan tugas, fungsi, sususnan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara jo peraturan Presiden No. 10 tahun yang telah di ubah dengan peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, status kelembagaan Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sendiri merupakan integrasi dari kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan Lembaga Informasi Nasional.

Pada tahun 2010 sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa ada perubahan dari peraturan menteri nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) bahwa klasifikasi, kedudukan, tugas dan fungsinya bahwa UPT Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Kemudian baru pada awal tahun 2018 berdasarkan peraturan mentri no 19 tahun 2017 berubah menjadi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo).

2.2 Mengenai BPSDMP Kominfo Yogyakarta

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) di bawah naungan Badan Peneliti dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikas dan Informarika. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika berjumlah 8 (delapan) unit, yang terdiri atas: 2 (dua) BBPSDMP Kominfo; dan 6 (enam) BPSDMP Kominfo.

BPSDMP Kominfo Yogyakarta beralamat jalan Imogiri Barat Km 5, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Wilayah kerja mencakup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Kegiatan operasional BPSDMP Kominfo Yogyakarta berfokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan gidang komunikasi dan informatika. Selain itu terdapat beberapa kegiatan lain yang berfungsi mendukung pelaksanaan penelian seperti melakukan data wilayah bidang komunikasi dan informatika, data media massa, dan penerbitan jurnal serta majalah semi ilmiah. Sebagai lembaga penelitian, pegawai BPPKI Yogyakarta merupakan tenaga fungsional yang meliputi fungsional peneliti, fungsional litkayasa, dan fungsional analis kepegawaian

2.3 Area Wilayah BPSDMP Kominfo Yogyakarta

Wilayah kerja dari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Bali.

2.4 Tagline

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

2.5 Visi & Misi BPSDMP Kominfo Yogyakarta

a. Visi

Menjadi Lembaga Riset dan Pengembangan yang Kredibel dalam Bidang Komunikasi dan Informatika di Indonesia.

Makna Visi:

1. Peningkatan Kegiatan Riset
2. Peningkatan Kegiatan Pengembangan
3. Publikasi Hasil Riset
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Berkelas Nasional

b. Misi

1) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI.
2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
3) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa
4) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
5) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.
6) Tujuan BPPKI Yogyakarta

7) Menjadi lembaga riset dan pengambangan berkelas nasional yang produktif dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

8) Menjadi lembaga riset dan pengembangan yang bertata kelola baik *(good corporate governance)* dan berdaya saing tinggi.

2.6 Tujuan BPSDMP Kominfo Yogyakarta

1. Meningkatnya karya riset yang bermanfaat dan terpercaya.
2. Meningkatnya pemanfaatan karya riset oleh masyarakat dan industri.
3. Meningkatnya publikasi hasil-hasil riset dan pengembangan bidang kominfo.
4. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai lembaga komunikasi pemda, lembaga penelitian di PT, LSM, Media massa dan komunitas.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mencapai hasil-hasil riset dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Meningkatnya layanan pada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika

2.7 Sasaran BPSDMP Kominfo Yogyakarta

1. Terlaksananya riset dan pengembangan bidang kominfo
2. Mendorong tumbuhnya iklim riset dan pengembangan bidang informasi dan informatika serta terbangunnya sumber daya manusia yang unggul dibidang komunikasi dan informatika.
3. Tersedianya konten informasi lokal yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka NKRI.
4. Meningkatnya penyebaran, pemerataan dan pemanfaatan informasi publik.

5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga komunikasi pemda, lembaga penelitian di PT,LSM,Media massa dan Komunitas masyarakat lainnya di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guna mencapai hasil-hasil riset dan pengembangan kualitas sumber di bidang komunikasi dan informatika.
7. Meningkatkan layanan pada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

2.8 Struktur Organisasi BPSDMP Kominfo Yogyakarta

Menurut Permen Kominfo No.19 tahun 2017

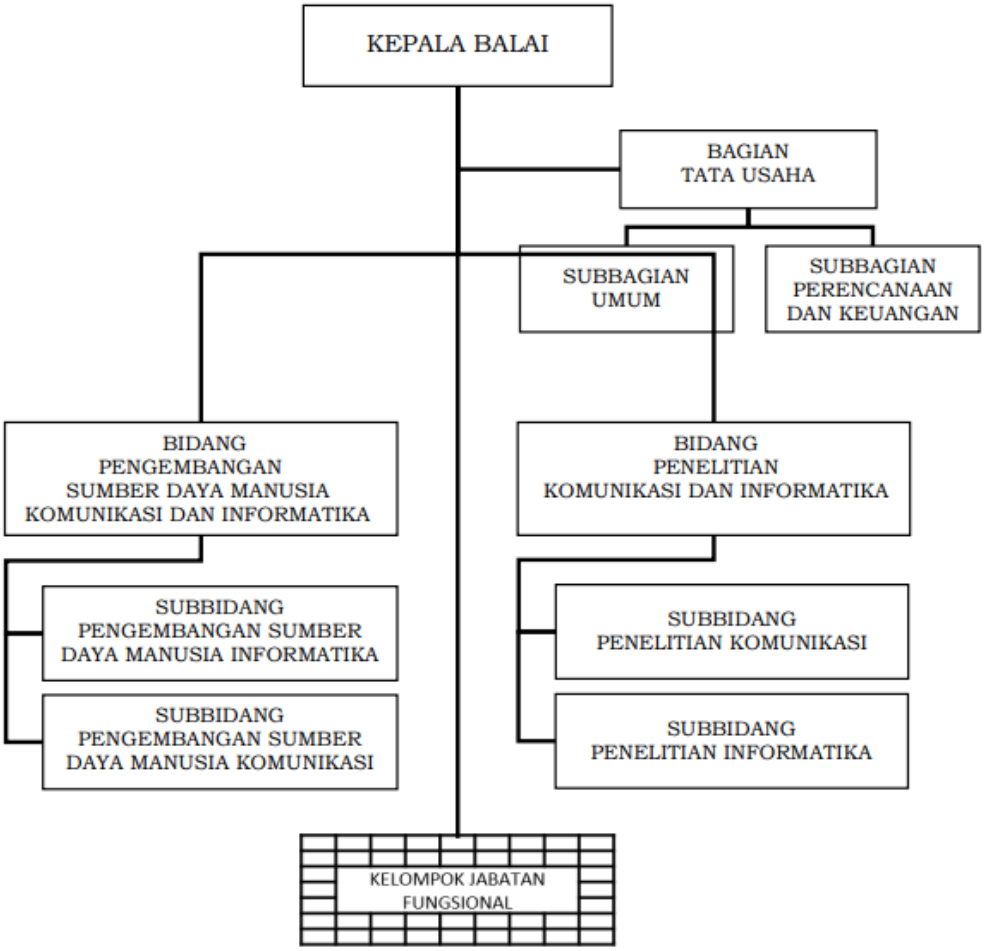

2.9 Fungsi BPSDMP Kominfo Yogyakarta

Menurut pasal 3, ayat (2) BPPKI menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran.
2. penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.
3. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.
4. penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.
5. penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

2.10 Tata Nilai BPSDMP Kominfo Yogyakarta

1. Akademis/Ilmiah: setiap langkah dan gerak insan BPSDMP Kominfo Yogyakarta selalu dilakukan dengan menjunjung tinggi etika Akademis.
2. *Good Governance:* menggunakan prinsip-prinsip Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Independen, dan *Fairness.*
3. Sinergi: setiap langkah dan gerak insan BPSDMP Kominfo Yogyakarta selalu dilakukan secara sinergi untuk mendapatkan hasil karya yang lebih baik.

4. Inovasi: setiap langkah dan gerak insan BPSDMP Kominfo Yogyakarta selalu ditujukan untuk menciptakan inovasi-inovasi di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan.